

BAB III

KEBIJAKAN INDONESIA KELUAR DARI KEANGGOTAAN OPEC (ORGANIZATION OF THE PETROLEUM EXPORTING COUNTRIES)

Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak Bumi atau sering disebut juga dengan OPEC (*The Organization of the Petroleum Exporting Countries*) merupakan awal mulanya yang dibentuk untuk dua belas negara pengekspor minyak bumi. Organisasi ini dibentuk bertujuan untuk mengkoordinasikan dan bekerja bersama dalam pembuatan kebijakan industri perminyakan. Organisasi yang dibentuk ini kemudian juga merespons para aktivis dan praktisi dari tujuh perusahaan besar minyak internasional atau *seven large international oil companies* (IOCs) yang dikenal dengan "*Seven Sisters*" (OPEC, 2013).

Langkah pertama dalam pembangunan OPEC ini dapat ditinjau kembali pada tahun 1949, ketika Venezuela mendekati empat negara lainnya sebagai negara penghasil minyak yang di antaranya ada Iran, Irak, Kuwait, dan Arab Saudi. Venezuela mengusulkan kepada empat negara tersebut untuk membentuk sebuah perkumpulan yang membahas mengenai kerjasama yang berkaitan dengan minyak. Namun, dorongan utama yang membentuk OPEC adalah setelah IOCs memutuskan untuk menurunkan harga minyak tanpa menanyakan terlebih dahulu pada pemerintah, yang mana OPEC lahir satu dekade kemudian (OPEC, 2013).

Dalam menanggapi hal tersebut, beberapa negara penghasil minyak memutuskan untuk mengadakan pertemuan di Kairo, Mesir, pada tahun 1959. Kongres ini merupakan kali pertama yang diadakan, yang mana Iran dan Venezuela

diundang sebagai pemantau. Setelah kongres tersebut diadakan dengan hasil bahwa IOCs terus melakukan penurunan harga minyak tanpa konfirmasi dari pemerintah, maka diadakan konferensi kembali pada tanggal 10-14 September 1960. Konferensi ini diadakan di Baghdad, Irak, dengan dihadiri oleh Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela (OPEC, 2013).

Negara-negara yang hadir pada konferensi tersebut merupakan anggota pendiri kelahiran OPEC. Setiap negara mengirimkan perwakilannya masing-masing, di antaranya yaitu Fuad Rouhani dari Iran, Dr. Tala'at alShaibani dari Irak, Ahmed Sayed Omar dari Kuwait, Abdullah Al-Tariki dari Arab Saudi, dan Dr. Juan Pablo Pérez Alfonzo dari Venezuela. Di dalam konferensi Baghdad ini, setiap perwakilan mendiskusikan peran IOCs dan perubahan harga minyak mentah. Negara-negara penghasil minyak ini melihat bahwa adanya kebutuhan yang penting untuk membuat organisasi. Organisasi ini melihat bahwa penting untuk menjaga hasil alam yang tidak dapat diperbarui dan begitu penting yaitu minyak (OPEC, 2013).

Maka pada saat itu, terbentuklah OPEC sebagai organisasi permanen non-pemerintah. Markas pertama organisasi ini adalah di Jenewa, Swiss. Pada bulan April 1965, sekretariat OPEC diputuskan untuk dipindah ke Wina, Austria, dan disetujui oleh pemerintah Austria pada 1 September 1965. Setelah terbentuknya OPEC, pemerintah masing-masing negara anggota OPEC, kini memiliki kendali lebih atas hasil alam yang mereka miliki yang khususnya berupa minyak. Karena sebelum adanya OPEC, rata-rata kendali atas eksploitasi minyak dikuasai oleh perusahaan asing. Dalam tahun berikutnya setelah pembentukan OPEC ini, OPEC menyadari bahwa perannya dapat memainkan pasar minyak global (OPEC, 2013).

A. Sejarah Indonesia Dalam Keanggotaan OPEC

Keanggotaan OPEC sendiri adalah terbuka bagi setiap negara yang mengekspor minyak mentah dan memiliki pandangan yang sama pada organisasi tersebut. Sebuah negara dapat menjadi anggota penuh apabila negara tersebut meminta untuk bergabung dalam OPEC dan disetujui oleh tiga perempat dari mayoritas negara anggota penuh (termasuk semua negara pendiri). Untuk status Indonesia dalam keanggotaan OPEC di masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah *suspended* atau ditangguhkan keanggotaannya di tahun 2009. Indonesia sendiri telah menjadi negara anggota OPEC sejak tahun 1962 (OPEC, 2013).

Indonesia yang pada saat itu bergabung dengan OPEC di tahun 1962 karena lebih melihat perjuangan OPEC yang merupakan suatu perjuangan negara ketiga. Indonesia mengerti bahwa OPEC adalah kumpulan negara berkembang yang berjuang dalam melawan kekuatan besar negara-negara industri maupun perusahaan-perusahaan multinasional yang menguasai minyak. Indonesia pada waktu itu juga sudah mulai mengekspor minyak, sehingga memiliki kepentingan yang sama dengan negara-negara anggota OPEC lainnya. Terjaminnya stabilitas harga pada tingkat yang layak, selain memberikan sumber dana yang signifikan bagi anggaran belanja negara, juga untuk kestabilan anggaran itu sendiri. Pada saat itu, Indonesia sangat menikmati kenaikan harga dari 2 dolar Amerika Serikat per barel menjadi

12 dolar setelah embargo minyak yang terjadi perang Arab-Israel tahun 1974 (Rahman, 2014).

Sekilas berbalik ke belakang, bergabungnya Indonesia untuk menjadi negara anggota OPEC juga diwarnai oleh dinamika politik luar negeri Indonesia pada waktu itu. Menurut Rajesh Kumar, gambaran politik luar negeri Indonesia di masa itu yakni bahwa prinsip dasar politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif. Bebas aktif ini kemudian didefinisikan secara luas sebagai partisipasi aktif dan mandiri dari kepentingan nasional Indonesia. Partisipasi dan aktif ini yang kemudian secara spesifik diwujudkan dalam pendirian politik non-blok, yang artinya Indonesia tidak memihak pada blok Barat maupun blok Timur. Implementasi dari prinsip-prinsip tersebut berubah dengan berkembangnya zaman dan situasi politik internasional. Implementasi tersebut merupakan cerminan dari bergantinya kondisi dan situasi eksternal (politik internasional) dan sebagian merupakan reaksi dari pergantian kebutuhan domestik Indonesia (Achidsti, 2016).

Kebijakan suatu negara yang bersifat domestik maupun internasional akan selalu didasarkan pada kepentingan nasional. Tentunya kebijakan luar negeri yang dibuat oleh suatu negara adalah kebijakan yang mewakili kondisi dan kepentingan nasional negara tersebut. Dalam hal ini, kepentingan nasional menjadi sebagai acuan dalam menetapkan posisi negara yang bersangkutan pada masalah dan/atau isu-isu yang berkaitan dengan masalah internasional. Selain itu, kebijakan luar negeri yang dibuat

juga sebagai bentuk keterlibatannya dalam menangani suatu masalah yang sifatnya adalah hubungan internasional. Oleh sebab itu, kebijakan suatu negara, khususnya dalam kebijakan luar negeri, tidak hanya mewakili kepentingan nasionalnya saja di kancah internasional, tetapi juga sebagai ketegasan posisi suatu negara dalam menghadapi permasalahan internasional.

Ketika Indonesia baru merdeka, Indonesia dipimpin oleh Ir. Soekarno yang menjadi presiden pertama Republik Indonesia dan didampingi oleh Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia. Pada masa awal-awal kemerdekaan Indonesia, arah kebijakan politik luar negeri dan diplomasi Indonesia lebih ditujukan untuk memperoleh pengakuan kemerdekaan Indonesia di dalam dunia internasional. Selai itu, lebih menekankan bahwa Indonesia mengecam segala bentuk penjajahan di muka bumi. Dengan di bawah rezim Presiden Soekarno, politik luar negeri Indonesia ketika itu lebih banyak ditentukan oleh kepentingan politik domestik dan sedikit mengikuti tekanan lingkungan internasional (Wuryandari, 2008).

Politik luar negeri Indonesia yang dikenal dengan istilah “Bebas Aktif”, dapat diartikan pula sebagai kebijaksanaan dan tindakan-tindakan yang diambil atau sengaja tidak diambil oleh pemerintah dalam hubungannya dengan negara-negara asing atau organisasi-organisasi internasional dan regional. Politik luar negeri ini diarahkan demi tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia (Jusuf, 1989). Dengan definisi

politik luar negeri bebas aktif inilah yang kemudian menjadi prinsip dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri ini bebas aktif ini juga tidak terlepas dari konteks dan masalah pada konstelasi politik internasional, yang mana bebas aktif ini akan disesuaikan dengan konteks yang ada pada saat itu.

Setelah era kepemimpinan Presiden Soekarno usai sebagai presiden Republik Indonesia, Indonesia dilanjutkan oleh Presiden Soeharto. Kita telah mengetahui bahwa selama Indonesia merdeka, Presiden Soeharto adalah presiden yang paling lama berkuasa di Indonesia. Era pemerintahan beliau kurang lebih hingga mencapai 32 tahun masa kepemimpinan. Di dalam masa kepemimpinan beliau, era ini disebut juga dengan Orde Baru sering disebut juga dengan Orba. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto inilah, Indonesia lebih berfokus pada pembangunan sektor ekonomi (Wuryandari, 2008).

Politik luar negeri Indonesia pada masa rezim Presiden Soeharto lebih dipengaruhi oleh pola-pola ekonomi dan politik internasional yang memiliki dinamika yang cukup signifikan dalam pembangunan Indonesia. Sektor pembangunan ekonomi dan politik adalah sektor yang paling berpengaruh terhadap dinamika kondisi domestik, modalitas, struktur dan penentuan politik luar negeri di Indonesia (Wuryandari, 2008). Dengan gaya kepemimpinan politik era Soeharto inilah, politik luar negeri Indonesia yang mengacu pada pembangunan sektor ekonomi menjadi agenda utama yang juga berkaitan dengan isu-isu domestik Indonesia. Presiden Soeharto juga

mendefinisikan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif adalah bahwa Indonesia berprinsip non-blok dan tidak identik dengan tidak adanya keterlibatan.

Dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif inilah Indonesia juga menjadi pelopor dalam pembentukan *Association of South East Asian Nations* (ASEAN). Karena politik luar negeri Indonesia adalah bebas di mana Indonesia bebas dari ikatan apa pun juga, baik itu dalam secara militer, politik ataupun secara ideologis. Selain ASEAN, Indonesia juga terlibat dalam membentuk kondisi perekonomian global yang stabil dan kondusif, serta memaksimalkan kepentingan nasional. Misalnya saja Indonesia masuk menjadi anggota negara-negara produsen atau penghasil minyak yang kita kenal dengan sebutan OPEC. OPEC ini menjadi ukuran pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia dalam hal stabilitas perekonomian dunia.

Pada masa Presiden Soeharto inilah, politik luar negeri Indonesia cenderung sangat kooperatif dengan negara-negara lain, khususnya negara-negara Barat. Konsep kebangsaan atau nasionalisme diidentikkan dengan percepatan pembangunan dengan konsep dan teknik yang diadopsi dari negara-negara luar. Politik luar negeri Indonesia juga masih cenderung patronatif —kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang untuk membuat perjanjian dalam suatu kontrak kerja— dengan kebijakan dan orientasi ideologi liberal yang diusung dalam globalisasi (Wuryandari, 2008).

Indonesia sekarang ini, yaitu pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bukanlah Indonesia di era Presiden Soeharto pada masa Orde Baru. Karena pada waktu itu, negara kita dikenal sebagai produsen dan eksportir utama minyak dunia. Selama 32 tahun pemerintahan Soeharto berkuasa, yakni antara 1966-1998, rata-rata produksi minyak mencapai 1,38 juta barel per hari. Saat itu, negara ini mengalami era kemakmuran minyak, bahkan sebagian besar pembangunan ekonomi nasional dibiayai dari minyak. Kontribusi migas terhadap pendapatan negara sangat signifikan, melebihi 50 persen, bahkan pada 1980-an sumbangan minyak pernah mencapai lebih dari 70 persen (Kata Data, 2013).

Akibatnya dari produksi minyak Indonesia yang terus menurun, menjadikan Indonesia berstatus sebagai pengimpor sejak tahun 2004. Dalam konferensi ke-149 yang digelar di markas besar OPEC di Wina, Austria, seluruh anggota OPEC sepakat dengan status suspensi atas keanggotaan Indonesia. Hal ini dalam konferensi tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan keluar dari keanggotaan OPEC yang mana telah dibahas dalam sidang kabinet bulan Mei 2008 (Harian Kompas, 2008). Dengan demikian OPEC resmi menerima pengunduran diri Indonesia dari keanggotaan OPEC. OPEC sendiri mengharapkan Indonesia bisa bergabung lagi jika sudah kembali berstatus sebagai pengekspor minyak.

B. Keputusan dan Urgensi Indonesia Keluar Dari OPEC

Dalam satu dekade terakhir ini, Indonesia menghadapi penuaan lapangan minyak. Penuaan lapangan minyak ini berdampak pada penurunan produksi dan makin sukarnya ditemukan lapangan-lapangan minyak baru. Selain berkurangnya kegiatan eksplorasi, yang mana hal ini akibat dari krisis politik dan ekonomi, cadangan terbukti Indonesia sekarang hanya sebesar 4.1 milyar barel, yaitu hanya 0.3% dunia. Setelah mencapai puncaknya pada tahun 1996-an, produksi Indonesia akan minyak buminya terus menurun. Sementara itu, makin sulitnya menemukan kondisi wilayah eksplorasi baru. Belakangan ini kegiatan eksplorasi sudah makin ditingkatkan, namun hasil yang signifikan baru akan dirasakan dalam kurun waktu 6-8 tahun ke depan.

Produksi minyak Indonesia kurang dari 1 juta bph (barel per hari) saat ini, Indonesia hanya memiliki sekitar 60-70 persennya dan sisanya merupakan porsi biaya produksi dan hak mitra bagi hasil. Dengan konsumsi Indonesia yang lebih dari satu juta bph untuk BBM, harus diimpor setidaknya 300 ribu bph minyak mentah dan 400 ribu bph BBM. Dengan demikian, secara keseluruhan berarti Indonesia sudah benar-benar menjadi *net importer*. Karena Indonesia sendiri juga memiliki kepentingan jangka panjang dalam pengamanan sumber-sumber minyak dan gas untuk kebutuhan dalam negeri. Upaya yang telah dilakukan di dalam negeri yaitu meningkatkan cadangan terbukti dan jumlah produksi melalui peningkatan investasi dan kegiatan eksplorasi dan produksi (Rahman, 2014). Dikutip

dari Cetak biru Pengelolaan Energi Nasional (PEN), diprediksi bahwa dalam 20 tahun ke depan, Indonesia masih akan sangat tergantung kepada minyak sebagai sumber energi. Keadaan tersebut menuntut Indonesia mau tidak mau harus mencari sumber-sumber minyak di luar negeri.

Dengan demikian, Indonesia perlu mengembangkan sumber-sumber minyak di luar negeri oleh perusahaan nasional kita. Hubungan baik dengan negara-negara OPEC juga dapat dijadikan aset yang baik dalam usaha ini. Usaha tersebut antara lain yakni diperolehnya konsesi lapangan minyak di Irak bagi Pertamina. Pertamina juga sudah memperoleh wilayah kerja di Libya dan Qatar dan sedang dijajaki di Ekuador. Kerjasama patungan juga sudah diperoleh dengan perusahaan Iran untuk mengelola produksi minyak di satu kawasan di negara tersebut (Rahman, 2014).

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia memberlakukan kebijakan luar negeri dengan keluarnya Indonesia dari OPEC. Hal ini dikarenakan kepentingan Indonesia sudah bergeser dari yang tadinya adalah *net exporter* menjadi *net importer*. Beberapa pendapat menyatakan bahwa Indonesia menerapkan kebijakan luar negeri untuk keluar dari keanggotaan OPEC dianggap lebih cocok bagi Indonesia. Dengan pertimbangan kondisi perminyakan di Indonesia. Keluarnya Indonesia sendiri juga tidak dengan tanpa alasan. Pertama, yaitu Indonesia menghindari konflik kepentingan dalam forum OPEC. Kedua, keluarnya dari keanggotaan OPEC diharapkan lebih menyadarkan masyarakat bahwa negara kita bukan lagi sebagai negara makmur dengan minyak. Melainkan

saat ini Indonesia sudah sebagai pengimpor minyak, sehingga harus lebih terpacu untuk meningkatkan efisiensi serta mengembangkan energi alternatif yang cukup banyak di negeri ini (Rahman, 2014).

Keluarnya Indonesia dari OPEC juga bukan hal yang *saklek*. Karena dengan kebijakan ini, pemerintah Indonesia menimbang pada dinamika kepentingan nasional saat itu. Misalnya saja negara Ekuador yang mana setelah 15 tahun keluar dari OPEC, beberapa tahun kemudian di tahun 2007 lalu masuk kembali ke dalam organisasi tersebut. Indonesia dapat melakukan tindakan yang serupa pada saat yang tepat apabila diperlukan. Hal yang terpenting adalah dalam statusnya yang berada di luar keanggotaan OPEC, strategi Indonesia yaitu memelihara hubungan persahabatan dengan negara-negara anggota OPEC. Hubungan ini tidak lain karena kerjasama yang sudah sangat baik secara bilateral maupun multilateral. Indonesia juga tetap dapat menawarkan peran ke OPEC dalam stabilisasi pasar minyak dunia, antara lain sebagai jembatan antara produsen dan konsumen, khususnya negara-negara berkembang.

Perlu diketahui juga bahwa Indonesia tidaklah keluar sepenuhnya dari OPEC yang mana Indonesia telah menjadi bagian penting dari organisasi tersebut. Melainkan status Indonesia yang pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sudah menjadi *net importer* minyak dan hal ini merupakan alasan utama karena kepentingan Indonesia telah bergeser dari produsen menjadi konsumen. Kemudian, status suspensi merupakan jalan tengah untuk Indonesia, karena bukan berarti *withdrawal* atau

Indonesia keluar sepenuhnya. Dengan demikian, citra keutuhan OPEC masih tetap terpelihara. Di sisi lain, kebijakan Indonesia ini adalah yang paling baik bagi Indonesia untuk tetap memelihara persahabatan dengan anggota OPEC yang dikenal dalam dunia internasional sebagai pemilik 70 persen cadangan minyak dunia (Rahman, 2014).

Setelah keluarnya Indonesia dari OPEC (dengan status suspensi), di masa yang akan datang, Indonesia juga menjadi lebih aktif dalam forum energi lain, seperti *International Energy Forum* (IEF) dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga energi internasional seperti *International Energy Agency* (IEA) yang akan dibahas di bab IV. Indonesia juga tetap harus menjaga hubungan baik dengan OPEC itu sendiri, walaupun kini bukan menjadi negara anggota. Selain itu, Indonesia pun melakukan kerja sama di bidang energi kawasan dalam ASEAN dan APEC demi memperkuat keamanan energi negara Indonesia.

C. Evaluasi Indonesia Setelah Keluar Dari OPEC

Seperti pembahasan sebelumnya, isu keamanan energi di dalam kancah internasional semakin mengkhawatirkan. Kekhawatiran ini meningkat disebabkan oleh beberapa hal. Antara lain yang saat ini Indonesia tengah hadapi yaitu menipisnya cadangan bahan bakar fosil, meningkatnya ketergantungan terhadap sumber energi non-domestik, geopolitik yang menghambat pasokan energi, dan meningkatnya pemakaian energi di negara berkembang. Selain itu, faktor peningkatan jumlah penduduk yang

semakin bertambah, lingkungan dan perubahan iklim yang semakin mengancam, dan belum signifikannya peran energi terbarukan untuk dimanfaatkan, serta belum optimalnya energi alternatif lain.

Pada umumnya, pemerintah negara penghasil minyak yang mana tergabung dalam OPEC maupun negara yang tidak tergabung, mereka cenderung ingin memaksimalkan pendapatan negaranya dari minyak yang dihasilkan. Banyak juga yang memperdebatkan mengenai tujuan ini, apakah sebaiknya dicapai dengan memaksimalkan pendapatan hasil minyak saat ini atau dengan mengembangkan kebijakan yang bisa memaksimalkan pendapatan pada periode satu atau dua dekade mendatang. Tentunya bukan hanya untuk satu tahun atau dua tahun mendatang saja (Svetlana Tsalik, 2005).

Keluarnya Indonesia dari OPEC tentunya juga berdampak pada Indonesia itu sendiri, baik bersifat positif maupun negatif. Apabila kita melihat dari dampak positifnya, Indonesia tidak lagi membayar iuran keanggotaan OPEC yang besarnya hingga 2 USD (dolar Amerika Serikat) juta per tahun, dan tidak lagi terikat oleh batasan-batasan yang diberlakukan oleh OPEC.

Besarnya iuran keanggotaan yang dibayarkan tiap tahunnya untuk OPEC yang sebesar USD 2 juta per tahun, dapat dikatakan cukup banyak untuk Indonesia. Sebab, pada tahun 2008 tengah terjadi ancaman krisis ekonomi yang bermuara di negara Amerika Serikat (Sugianto, 2015). Status Indonesia yang keanggotaannya dibekukan sementara dalam OPEC, tidak

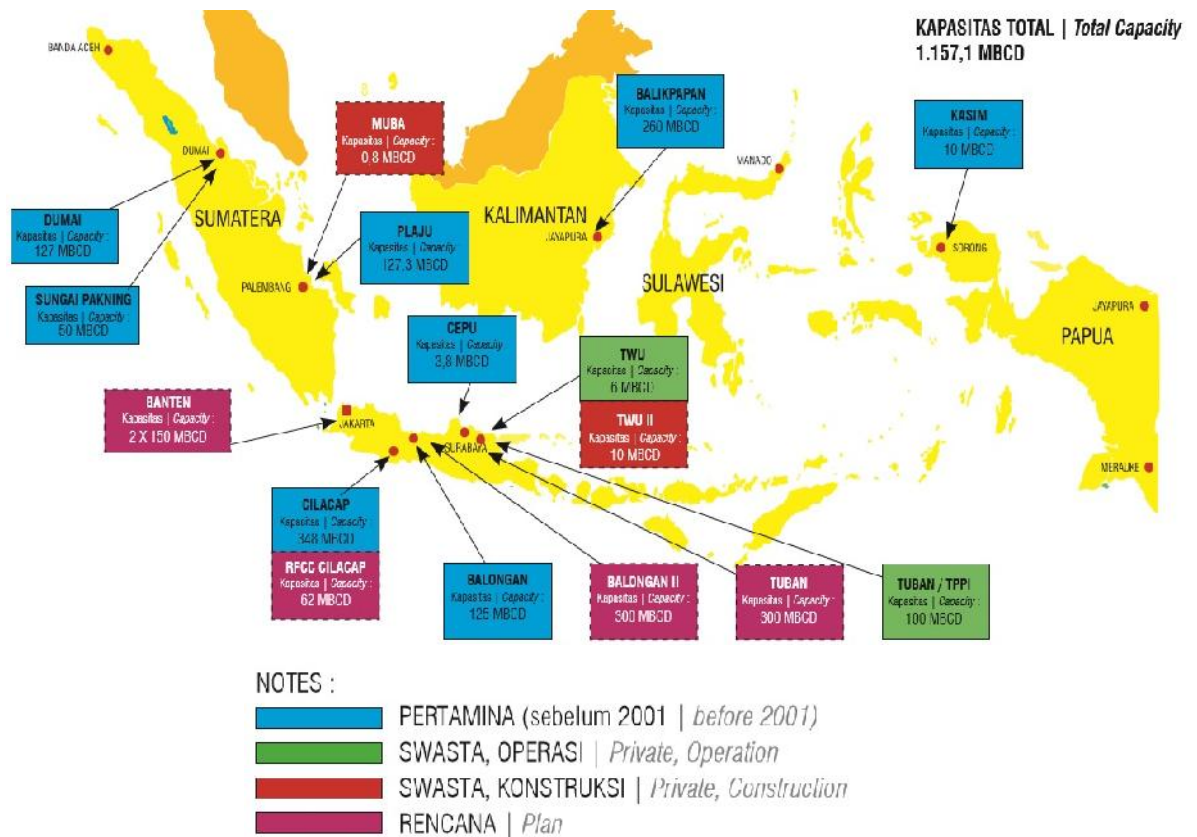
mengharuskan Indonesia membayar uang iuran keanggotaan tersebut. Selain itu, Indonesia juga tidak lagi terikat dengan peraturan yang dibuat oleh OPEC dan tidak adanya batasan-batasan untuk Indonesia. Artinya, Indonesia dapat mengelola sumber daya energinya, khususnya minyak bumi, tanpa terikat regulasi OPEC. Hal ini penting karena cadangan minyak Indonesia yang semakin menipis sehingga tidak memungkinkan untuk menjadi *net importer* kembali. Sehingga cadangan minyak yang dihasilkan Indonesia dapat dikelola secara domestik dan dapat menjadi cadangan energi minyak jangka panjang.

Tidak mampunya Indonesia dalam memproduksi dan mengontrol cadangan minyak mentah, serta menentukan volume ekspor pada skala dunia karena minimnya cadangan minyak. Kondisi inilah yang kemudian mendorong Indonesia menentukan kebijakan untuk keluar dari keanggotaan OPEC. Hal ini mengingat keanggotaan OPEC ditentukan oleh kontrol negara anggota terhadap cadangan dan produksi minyak mentah masing-masing negara, sehingga bisa mengatur politik harga minyak.

Produksi minyak Indonesia juga tidak lepas dari campur tangan asing. Dalam kata lain, produksi minyak dibantu oleh perusahaan asing atau kontraktor asing. Negara juga tidak bisa memaksa kontraktor asing untuk memacu volume produksi, karena kedudukan mereka sebagai kontraktor pemerintah, yang dalam hal ini melalui badan pelaksana, sehingga tidak dapat secara langsung memimpin kegiatan produksi (Syamsul Hadi, 2012).

Berikut ini adalah peta perusahaan kilang minyak nasional dan asing yang mengelola minyak bumi di Indonesia:

Gambar 3.1 Peta Perusahaan Kilang Minyak di Indonesia



Sumber: (Kementerian ESDM, 2013)

Dalam UU Migas yang baru ini, terdapat regulasi mengenai produksi minyak bumi, apabila Indonesia masih sebagai negara anggota OPEC yang mana harus menurunkan produksi, maka hal tersebut akan sulit terpenuhi. Sebab, jika tidak disetujui oleh kontraktor asing yang berada di Indonesia, maka mereka berhak membawa pemerintah Indonesia ke ranah

arbitrase internasional (Syamsul Hadi, 2012). Selain itu, dengan kondisi cadangan minyak Indonesia, permintaan tersebut juga sulit untuk dipenuhi.

Kita dapat melihat bahwa dengan rendahnya produksi minyak bumi Indonesia, kebijakan ekspor ini juga diperparah dengan kuota produksi yang ditetapkan oleh OPEC. Isu ketergantungan terhadap minyak bumi yang dihadapi Indonesia telah diperkuat oleh fakta bahwa cadangan energi tersebut semakin terbatas. Hal ini yang kemudian mendorong perubahan paradigma pemerintah Indonesia mengenai pengelolaan energi nasional. Paradigma sumber energi sebagai generator pendapatan negara melalui ekspor dipandang tidak akan membawa kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang. Akan lebih baik bila sumber energi tersebut dapat digunakan semaksimal mungkin untuk menggerakkan roda perekonomian dalam negeri (Sehat Aditua F.S, 2011).

Selain memprioritaskan pasokan energi untuk kebutuhan dalam negeri, hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah mendiversifikasikan penggunaan sumber energi yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Diversifikasi sumber energi sangat penting dilakukan dalam rangka mengurangi ketergantungan kepada minyak bumi. Dalam rangka mendukung diversifikasi tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional yang memuat target bauran energi nasional (*energy mix*) pada tahun 2025. Target bauran energi tersebut bertujuan untuk melepaskan diri dari ketergantungan minyak bumi dengan mendorong pemakaian energi final yang berasal dari sumber

energi lain. Gas Bumi dipandang sebagai sumber energi alternatif potensial mengingat jumlah cadangan gas bumi masih sangat berlimpah. Cadangan gas bumi Indonesia diperkirakan masih dapat digunakan hingga 59 tahun ke depan. Oleh karena itu, gas bumi memegang peranan penting dengan target penggunaan sebesar 30% dari penggunaan energi nasional tahun 2025 (Sehat Aditua F.S, 2011).

D. Diplomasi Indonesia Dengan Negara Anggota OPEC

Indonesia adalah salah satu negara dengan kebutuhan minyak yang cukup tinggi. Indonesia juga merupakan salah satu pemain utama dalam pasar energi di kawasan Asia Pasifik. Konsumsi energi Indonesia dapat dikatakan berada dalam urutan terbesar kelima di bawah Tiongkok, India, Jepang, dan Korea Selatan. Selain akan konsumsi minyak buminya, ketersediaan Indonesia akan batu bara yang cukup besar menjadikan Indonesia memegang peranan penting sebagai pemain dalam pasar batu bara di Asia Pasifik. Dalam sektor batu bara ini, Indonesia menjadi produsen.

Dalam produksinya, Indonesia mampu memproduksi batu bara hingga sebesar 143.652 Ktoe atau berada di urutan keempat setelah Tiongkok, India, dan Australia. Tentunya, produksi tersebut tidak hanya digunakan untuk kebutuhan dalam negeri, sebab kebutuhan Indonesia akan batu bara ini sudah tercukupi tanpa harus mengimpor dari negara lain. Dengan banyaknya ketersediaan batu bara ini, Indonesia juga mengeksportnya ke negara-negara Asia Pasifik maupun di luar kawasan Asia

Pasifik. Negara-negara importir utama dari batu bara Indonesia antara lain seperti India, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Tiongkok, dan Malaysia. Khusus yang terbesar yang melakukan impor ini adalah India dan Tiongkok (Alami, 2014).

Selain batu bara, Indonesia juga merupakan pemain utama dalam pasar minyak bumi di kawasan Asia Pasifik yang cukup signifikan. Peran Indonesia dalam sektor minyak bumi ini adalah sebagai produsen dan konsumen, artinya Indonesia sebagai negara eksportir sekaligus importir bagi minyak mentah (*crude oil*). Indonesia yang kini menjadi negara importir minyak di kawasan Asia Pasifik, adalah salah satu negara dengan impor minyak terbesar. Tingginya konsumsi minyak di tengah keterbatasan cadangan dan produksi minyak, menjadikan Indonesia tidak dapat hanya bertumpu pada produksi minyak dalam negeri saja (Alami, 2014).

Dengan kebutuhan minyak Indonesia yang semakin meningkat, yang mana hal ini juga diiringi dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan penambahan populasi penduduk Indonesia. Terlebih saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia telah memasuki era industrialisasi. Oleh sebab itu, kebutuhan konsumsi minyak Indonesia harus dapat dipenuhi dengan cara mengimpor minyak dari negara lain. Pada tahun 2010 saja, impor minyak Indonesia telah mencapai 101.093.030 barel minyak. Tentunya impor minyak ini berasal dari negara Arab Saudi (44.050.541), Malaysia (24.451.592), Turki (11.340.882), Nigeria (10.344.698), Brunei Darussalam

(7.644.040), Aljazair (1.988.948), Sudan (655.341), dan Tiongkok (616.988) (Kementerian ESDM, 2010).

Apabila kita cermati, total impor minyak Indonesia tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai ekspor minyak bumi Indonesia di tahun 2010. Nilai ekspor minyak bumi Indonesia di tahun tersebut hanya sebesar 121 ribu barel saja. Situasi impor dan ekspor Indonesia mengisyaratkan kepada kita bahwa tentunya nilai ekspor minyak bumi semakin menurun. Sedangkan kebutuhan konsumsi minyak semakin meningkat, dengan ini jumlah impor minyak bumi juga akan terus semakin meningkat.

Pasca keluarnya Indonesia dari OPEC atau lebih tepatnya dibekukan secara sementara, Indonesia di sini perlu menjalin hubungan yang baik serta komunikasi yang berkelanjutan dengan negara-negara anggota OPEC. Kehadiran Indonesia sendiri adalah sebagai penyeimbang dalam posisi keanggotaan OPEC, karena Indonesia merupakan satu-satunya negara Asia yang tergabung dalam keanggotaan OPEC. Bergabungnya Indonesia ke dalam OPEC sendiri diduga dapat menetralisasi citra OPEC yang negatif, karena kebanyakan negara-negara yang bergabung di dalamnya adalah dominasi dari negara-negara Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin (Alami, 2014).

Selain negara Indonesia yang hanya berasal dari kawasan Asia, Indonesia juga memiliki kedekatan emosional keagamaan di antara negara-negara anggota OPEC secara mayoritas. Karena mayoritas dari para negara

anggota adalah negara dengan populasi penduduknya adalah muslim. Kemudian di antara negara anggota, Indonesia juga mengalami kedekatan historis, seperti halnya dengan negara Aljazair. Aljazair ini adalah salah satu negara yang memiliki relasi khusus dengan Indonesia. Pada masa pemerintahan presiden Soekarno, Indonesia adalah negara yang sangat mendukung perjuangan kemerdekaan Aljazair. Relasi baik inilah yang kemudian terus dijaga Indonesia dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi minyak Indonesia di masa yang akan datang. Meskipun Indonesia bukan lagi menjadi negara anggota penuh OPEC, dengan kita menjaga hubungan baik antara negara-negara anggota OPEC, Indonesia akan mendapat akses informasi dan jaringan terkait mengenai sumber pasokan energi (Sutoyo, 2005).

Konstelasi pasar minyak bumi di kawasan Asia Pasifik ini tidak dipungkiri, saat ini didominasi oleh negara-negara *net importer* yang mana persaingan perebutan pasokan minyak akan semakin ketat. Dengan adanya kedekatan emosional dan sejarah terhadap negara-negara anggota OPEC inilah, Indonesia memiliki modal yang begitu berharga. Kelebihan ini dapat digunakan Indonesia bukan hanya untuk mendapatkan lobi-lobi pasokan minyak, namun juga dapat meningkatkan posisi tawar-menawar (*bargaining position*) di kancah internasional (Alami, 2014).

Walaupun posisi Indonesia yang saat ini hanya sebatas negara *net importer* minyak bumi, Indonesia masih memiliki peluang untuk memainkan peran dalam pasar minyak kawasan Asia Pasifik maupun

global. Beberapa peluang yang dapat dimainkan Indonesia dalam kancah internasional tersebut di antaranya yakni tidak terlepas dari hubungan diplomasi dengan negara-negara anggota OPEC. Yang pertama yaitu Indonesia harus tetap menjaga relasinya dengan negara-negara anggota OPEC, karena dengan relasi tersebut Indonesia dapat meningkatkan *bargaining position* di dalam dunia internasional. Meskipun dengan status yang disandang Indonesia karena kebijakannya keluar dari OPEC, tentu tidak menghalangi Indonesia untuk tetap bekerjasama dengan negara penghasil minyak utama. Seperti, Arab Saudi, Iran dan Venezuela, meskipun di dalam internal OPEC, Indonesia sangat terbatas perannya (Alami, 2014). Dengan posisi Indonesia yang dulu pernah menjadi bagian dari OPEC inilah memberikan Indonesia ke dalam posisi yang strategis.

Kemudian yang kedua yaitu, Indonesia yang kaya akan potensial sumber energi non-fosil atau dengan kata lain energi terbarukan. Pemanfaatannya dapat lebih difokuskan untuk memenuhi kebutuhan domestik atau dalam negeri. Pemanfaatan energi terbarukan ini pun masih belum optimal, dan sebagian besar memang tidak dapat dijadikan barang ekspor. Akan tetapi dapat digunakan untuk konsumsi energi di dalam negeri, sehingga cadangan minyak yang ada di Indonesia dapat dihemat untuk kebutuhan jangka panjang. Energi terbarukan yang dimiliki Indonesia antara lain sumber energi panas bumi. Sumber energi ini memiliki potensi sebesar 27.199 MW yang apabila dikonversikan akan setara dengan 11 miliar barel minyak (Alami, 2014). Perlu diketahui bahwa jenis energi

semacam ini perlu dimaksimalkan penggunaannya karena sifatnya yang ramah lingkungan, selain itu juga tidak berdampak buruk pada kelestarian lingkungan apalagi sebagai penyebab pemanasan global.

Sektor energi terbarukan ini mulai mengalami kenaikan yang cukup signifikan ketika terjadinya kenaikan harga komoditas energi berbasis fosil. Dalam ranah global, beberapa negara mulai meningkatkan upaya dalam pengembangan industri ini. Dengan peningkatan sektor energi terbarukan yang relatif signifikan, investasi dalam bidang tersebut juga mulai meningkat. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2008 yang diakibatkan oleh krisis ekonomi global beserta masalah lainnya (Alami, 2014). Hal ini menjadikan Indonesia masuk dalam peluang untuk berinvestasi atau sebagai lahan investasi yang sangat menjanjikan dalam rangka penggunaan sumber energi untuk pemenuhan konsumsi maupun sebagai pemasukan anggaran negara.

Yang ketiga yaitu, Indonesia harus lebih mendorong perusahaan milik negara seperti Pertamina untuk lebih aktif dalam mencari sumber energi. Upaya tersebut dapat berupa investasi di negara lain, dengan cara memperluas peluang dan kiprahnya di pasar internasional. Negara-negara Afrika dan Rusia juga dapat menjadi tujuan investasi karena tujuan investasi Indonesia ini bersifat meluas dan untuk menjamin pasokan minyak. Diketahui juga negara-negara tersebut adalah negara penghasil minyak non-konvensional. Adapun yang keempat yaitu Indonesia dapat memainkan

perannya dengan melakukan investasi dan kerjasama dalam sektor industri energi konvensional seperti batu bara dan minyak bumi (Alami, 2014).